

POLA INTERAKSI INTERKOMUNAL UMAT BERAGAMA DI KOTA BANDA ACEH

Muhammad Sahlan

Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: sahlan_hanafiah@yahoo.com

Diterima: 26 Februari 2014; Disetujui 26 Maret 2014

Abstract: Intercommunity interaction among religious believer happened in two forms, one is on daily basis and another is associational. Daily interaction is significant, although it does not guarantee the creation of religious harmony among believers of various religions. Meanwhile associational interaction has a role in preventing religious conflict. However, intercommunity interaction in Banda Aceh city happens mainly in daily basis interaction compare to associational. The imbalance in interaction pattern will result in communication between religious believer on civil society and elite level hindered. The implication of this is supporters or superstructure of peace and religious harmony in Banda Aceh is fragile.

Abstrak: Interaksi interkomunal umat beragama terjadi dalam dua bentuk, yaitu keseharian dan asosiasional. Interaksi keseharian penting, namun tidak menjamin terciptanya kerukunan antar umat beragama. Sementara interaksi asosiasional berperan dalam mencegah terjadinya konflik keagamaan. Interaksi interkomunal antar umat beragama di Kota Banda Aceh lebih sering terjadi dalam bentuk keseharian dibanding asosiasional. Ketimpangan pola interaksi seperti ini menyebabkan komunikasi antar umat beragama di tingkat menengah (*civil society*) dan atas (*elite*) tidak berjalan dengan baik. Akibatnya basis pendukung atau suprastruktur perdamaian dan keharmonisan beragama di Kota Banda Aceh menjadi rapuh.

Keywords: Konflik, agama, interaksi interkomunal.

Pendahuluan

Studi tentang interaksi interkomunal umat beragama mengemuka setelah Ashutosh Varshney, salah seorang professor ilmu politik di Universitas Brown, Amerika Serikat mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku dengan judul; *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. Penelitian Varshney beranjak dari pertanyaan sebagian besar peneliti konflik; mengapa konflik keagamaan seringkali terjadi di suatu daerah, sementara di daerah yang lain tidak, padahal daerah tersebut sama-sama memiliki komposisi etnis dan agama yang beragam.

Hasil penelitian Varshney terhadap konflik komunal di India yang melibatkan kaum Hindu dan Muslim (1950-1995) sangat mengejutkan. Menurut Varshney, konflik komunal¹ di India hanya terjadi di daerah perkotaan yang

¹ Istilah konflik komunal menunjukkan konflik yang melibatkan antar komunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal dari kelompok agama tertentu. Jika kedua belah pihak pelaku dapat diidentifikasi berasal dari komunitas agama yang sama, maka

notabene dihuni oleh masyarakat terdidik dari kalangan kelas menengah ke atas. Dan menurutnya, konflik komunal terjadi karena jaringan kewargaan dalam bentuk interaksi interkomunal atau antar agama tidak terbangun dengan baik. Yang mengakar justru jaringan kewargaan dalam bentuk interaksi intrakomunal atau antar agama.²

Temuan Varsheny ini menarik jika dilihat dalam bingkai negara Indonesia dimana secara sosial keagamaan antara India dan Indonesia memiliki banyak sekali kesamaan, misalnya dalam hal keberagaman etnis dan agama. Dari segi konflik keagamaan, Indonesia juga memiliki intensitas konflik keagamaan yang relatif tinggi. Namun menariknya, tidak semua wilayah mengalami konflik keagamaan.

Aceh merupakan salah satu daerah yang aman dari isu dan konflik keagamaan, terutama yang bersifat komunal antar agama. Meskipun Aceh dikenal dengan daerah Serambi Mekkah, memiliki kekhususan dalam hal penerapan Syariat Islam, namun untuk kasus kekerasan atas nama agama, Aceh relatif tidak masuk dalam daftar pemberitaan media massa.³ Kekerasan atas nama agama justru lebih sering terjadi di wilayah lain di Indonesia yang tidak memproklamkan dirinya sebagai wilayah syariat Islam.

Beberapa tahun yang lalu misalnya, di Bekasi, Bogor dan Temanggung Jawa Tengah terjadi insiden kekerasan atas nama agama yang cukup mengerikan. Insiden di Bekasi dipicu oleh persoalan izin mendirikan rumah ibadah, di Bogor terkait dengan aktivitas jamaah Ahmadiyah⁴, sementara di Temanggung terkait keputusan pengadilan yang dinilai terlalu ringan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penistaan agama.⁵ Insiden-insiden yang terjadi di beberapa daerah tersebut menunjukkan bahwa masih ada persoalan agama yang belum terselesaikan di sana.

Kondisi Aceh yang aman dalam kehidupan beragama tentu saja mengundang tanda tanya banyak pihak. Merupakan sebuah anomali atau keganjilan bagi mereka ketika Aceh seharusnya dengan penduduk mayoritas beragama Islam, ditambah lagi dengan karakter masyarakat Aceh yang dikenal keras, konflik politik dan keamanan yang tidak stabil terutama sebelum penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka, maka seharusnya Aceh berpotensi menimbulkan gejolak antar umat

konflik semacam ini akan dimasukkan dalam kategori konflik sektarian. Untuk lebih jelas lihat Artikel Rudy Harisyah Alam di Jurnal PENAMAS, Vol. XXI, No. 3. Th. 2008 dan Vol XXII, No. 2. Th. 2009

² Ashutosh Varshney. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India* (New Haven & London: Yale University Press, 2002), 17.

³ Kerukunan Umat Beragama di Aceh Terjaga. Berita ini diunduh di <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/15/22341062>. diakses 2 November 2012.

⁴ <http://news.okezone.com/read/2011/03/11/338/433942/ahmadiyah-kembali-diserang-di-bogor/>. diakses 2 November 2012.

⁵ <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/02/08/122078/Sidang-Penistaan-Agama-di-Temanggung-Rusuh/>. diakses 2 November 2012.

beragama atau paling tidak kekerasan terhadap penganut agama minoritas. Namun pada kenyataannya terjalin interaksi yang harmonis di antara berbagai elemen masyarakat yang berbeda keyakinan. Permasalahan inilah yang akan dipaparkan dalam tulisan ini dengan mendeskripsikan pola interaksi interkomunal umat beragama di Kota Banda Aceh dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan yang terstruktur dengan baik.

Bentuk-bentuk Interaksi Sosial Keagamaan

Interaksi sosial keagamaan terjadi dalam tiga bentuk, yaitu; intrakomunal, interkomunal dan ekstra-komunal. Intrakomunal merupakan interaksi yang terjadi di dalam komunitas tertentu seperti dalam internal komunitas Muslim atau komunitas Kristen. Ia tidak bercampur dengan komunitas yang lain sehingga seringkali menimbulkan sikap eksklusifisme, tertutup dan menjaga jarak dengan komunitas yang lain. Sementara interkomunal merupakan interaksi yang terjadi antar komunal baik atas nama etnis atau agama. Misalnya antara orang-orang Muslim dengan Kristen, atau Hindu dengan Budha. Sementara interaksi ekstrakomunal berdiri di atas kedua pola interaksi tersebut.⁶

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa interaksi sosial keagamaan dalam bentuk yang disebutkan di atas merupakan hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu, kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Apabila dua orang bertemu, maka interaksi sosial dinilai telah dimulai pada saat itu. Apalagi jika yang bertemu lebih dari dua orang, bahkan mewakili identitas sosial masing-masing seperti identitas etnis dan agama, maka akan terjadi proses interaksi sosial yang lebih dinamis lagi.⁷

Menurut Soerjono, berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada berbagai faktor, diantaranya adalah faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Yang dimaksud dengan imitasi adalah proses meniru tindak tanduk atau perilaku orang lain. Proses ini menurut Soerjono tidak selalu berdampak positif karena bisa jadi yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Selain itu, imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan mematikan pengembangan daya kreasi seseorang. Demikian juga dengan sugesti yang hampir sama dengan imitasi. Sementara identifikasi dan simpati masih lebih baik karena memiliki ruang kreatifitas bagi masing-masing pihak yang melakukan interaksi.⁸

Interaksi sosial paling kurang memiliki empat bentuk, yaitu kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), pertentangan dan pertikaian (*conflict*) dan akomodasi (*accommodation*). Akomodasi adalah bentuk interaksi yang

⁶ Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, Dari Riset Perang ke Riset Bina Damai: Mengapresiasi Sumbangan Abu-Nimer dalam Mohammed Abu-Nimer. *Kekerasan dan Bina Damai dalam Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Alfabeta, 2010), xi-xxiii.

⁷ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 55.

⁸ *Ibid.*, 57-58.

terjadi akibat proses penyelesaian konflik yang mengalami jalan buntu sehingga semua pandangan dan sikap diakomodasi dalam satu wadah untuk sementara waktu sambil menunggu jalan keluar baru.⁹

Beberapa sosiolog seperti dikutip Soerjono Soekanto dan ditampilkan dalam table di bawah ini memberi pandangan yang berbeda soal bentuk interaksi sosial. Namun, jika melihat secara mendalam sebenarnya inti dari bentuk-bentuk interaksi tersebut tidak berbeda jauh dari empat bentuk yang disebutkan di atas.¹⁰

Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial		
Gillin dan Gillin	Kimball Young	Tomatsu Shibutani
Bentuk Interaksi adalah: 1. Proses yang asosiatif (akomodasi, asimilasi dan akulturasi) 2. Proses yang disosiatif (persaingan, pertentangan)	Bentuk Interaksi adalah: 1. Oposisi (persaingan dan pertentangan) 2. Kerjasama yang menghasilkan akomodasi) 3. Diferensiasi (tiap individu mempunyai hak dan kewajiban atas dasar perbedaan usia, seks dan pekerjaan	Bentuk interaksi adalah: 1. Akomodasi dalam situasi rutin 2. Ekspresi pertemuan dan anjuran 3. Interkasi strategis dalam pertentangan 4. Pengembangan prilaku massa

Sumber: Soerjono Soekanto

Memahami Konflik Keagamaan

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.¹¹ Senada dengan definisi Simon Fisher, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.¹²

Konflik berbeda dengan kekerasan. Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau system yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, social atau lingkungan dan menghalani seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Karena itu, konflik dipandang sebagai

⁹ *Ibid.*, 64.

¹⁰ *Ibid.*, 65.

¹¹ Simon Fisher, dkk. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2000), 4.

¹² Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9-10

kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.¹³

Konflik keagamaan diartikan sebagai perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Konflik keagamaan dapat mewujud dalam dua jenis aksi, yaitu aksi damai dan aksi kekerasan. Aksi damai dipahami sebagai setiap tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan dalam rangka menanggapi isu-isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian di masyarakat.¹⁴

Sementara itu, aksi kekerasan adalah setiap tindakan fisik yang dilakukan dalam rangka menanggapi isu-isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian, yang melibatkan dampak kekerasan baik terhadap orang maupun harta benda.

Selama ini interaksi dalam bentuk konflik paling banyak disorot oleh media dan kalangan peneliti sehingga memberi kesan seakan-akan masyarakat identik dengan perilaku konflik dan kekerasan. Pemberitaan media tentang konflik, termasuk konflik dan kekerasan atas nama agama tidak bisa dihindari karena kekerasan atas nama agama sangat massif terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini. Sebut saja beberapa contoh misalnya di Bekasi dan Bogor Jawa Barat, Maluku serta Sulawesi.

Laporan Tahunan tentang kondisi hubungan antar umat beragama yang ditulis oleh beberapa lembaga studi seperti Center for Religious Studies (CRS-UGM) Yogyakarta dan The Wahid Institut juga menggambarkan adanya dominasi interaksi sosial dalam bentuk konflik di tengah masyarakat beragama.

Namun, disisi lain sebenarnya banyak bentuk kerjasama yang diprakarsai oleh masyarakat seperti temuan Ashutosh Varshney dalam penelitiannya di India.

Dalam penelitiannya itu ia menemukan bahwa jaringan kewargaan interkomunal sangat penting dalam rangka mendorong perdamaian atau meminimalisir konflik berbasis agama. Jaringan terjadi dalam dua bentuk yaitu asosiasional dan keseharian. Contoh bentuk pertama antara lain asosiasi bisnis, organisasi profesi, klub pembaca, klub penggemar film, klub olah raga, organisasi perayaan, serikat buruh dan partai politik berbasis kader. Adapun contoh bentuk keseharian ikatan kewargaan berupa interaksi kehidupan yang sederhana dan rutin, seperti kunjung antar keluarga hindu dan keluarga muslim, kegiatan makan bersama dalam acara-acara perayaan, serta mengizinkan anak-anak mereka untuk bermain bersama di lingkungan.¹⁵

¹³ Simon Fisher, dkk. *Mengelola Konflik*, 4.

¹⁴ Lihat Artikel Rudy Harisyah Alam di Jurnal PENAMAS, Vol. XXI, No. 3. Th. 2008 dan Vol XXII, No. 2. Th. 2009

¹⁵ Ashutosh Varshney. *Ethnic Conflict and Civic Life*, 4.

Apabila kuat, kedua bentuk ikatan itu dapat mendorong terwujudnya kedamaian. Sebaliknya, jika kedua bentuk ikatan kewargaan itu tidak ada atau lemah, hal itu dapat membuka ruang bagi munculnya kekerasan komunal. Di antara kedua bentuk ikatan itu, ikatan asosiasional terbukti lebih kuat daripada ikatan keseharian, khususnya ketika masyarakat dihadapkan dengan upaya para politisi untuk memolarisasi komunitas-komunitas agama. Kehidupan asosiasional yang kokoh jika bersifat interkomunal, dapat menghalangi strategi polarisasi dari elit politik seperti yang dilakukan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini.

Pola Interaksi Keseharian

Salah satu interaksi interkomunal umat beragama di Kota Banda Aceh terjadi dalam bentuk keseharian. Interaksi keseharian merupakan interaksi yang terjadi sehari-hari atau pada saat-saat tertentu baik di tingkat dusun, gampong, kecamatan hingga kota.

Interaksi keseharian biasanya terjadi secara spontan, melalui inisiatif warga, tanpa perintah atau komando. Namun interaksi keseharian juga bisa diciptakan melalui sejumlah kegiatan atau dengan menyediakan fasilitas ruang publik terbuka sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat interkomunal untuk bertemu.

Di Kota Banda Aceh interaksi interkomunal terjadi dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah dalam bentuk kegiatan sosial di tingkat dusun dan gampong, kegiatan kemanusiaan di tingkat komunitas, transaksi ekonomi di pasar, festival budaya dan di ruang publik terbuka.

Interaksi melalui Kegiatan Sosial dan Misi Kemanusiaan

Kegiatan sosial dan misi kemanusiaan merupakan salah satu penghubung masyarakat interkomunal di dalam satu wilayah. Di Kota Banda Aceh, kegiatan sosial dan misi kemanusiaan terjadi dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk interaksi antar warga di dalam satu dusun dan gampong, kedua, interaksi dalam bentuk antar komunitas.

Interaksi melalui kegiatan sosial berjalan dengan baik di tingkat dusun dan gampong di lingkungan Kota Banda Aceh. Tradisi mengunjungi salah seorang warga yang tertimpa musibah seperti meninggal dunia atau sakit masih sangat kuat di tingkat dusun dan gampong. Saling mengunjungi dilakukan tanpa memandang latar belakang etnis dan agama. Ini misalnya dapat dilihat di Gampong Laksana dan Gampong Mulia, dua gampong di mana komposisi penduduk berdasarkan etnis dan agama lebih merata. Dua gampong ini juga pola hunian penduduknya lebih banyak di rumah dibanding di rumah toko (ruko).¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Rahmad, Keuchik Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 9 Agustus 2012 di Kantor Camat Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Demikian juga dengan Gampong Peunayong, dimana jumlah warga dari etnis Tionghoa lebih banyak jumlahnya dibanding warga pribumi, interaksi interkomunal dalam hal kegiatan sosial dan kemanusiaan berjalan baik. Hanya saja di Peunayong, interaksi masyarakat interkomunal tidak terjadi sampai ke tingkat gampong, melainkan hanya di dusun. Hal ini disebabkan karena pola hunian warga gampong peunayong rata-rata tinggal di rumah toko (ruko).

Selain pola hunian, jenis pekerjaan juga memberi dampak terhadap tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial. Rata-rata pekerjaan warga gampong Peunayong adalah pedagang dan penyedia jasa perbengkelan. Dua jenis pekerjaan ini sangat terikat dan menyita waktu sehingga hampir tidak ada waktu luang untuk bergabung dalam kegiatan sosial.

Akibatnya, beberapa kegiatan sosial seperti ronda malam, gotong royong dan kegiatan sosial lainnya dilakukan dengan pola swadaya masyarakat. Artinya, masyarakat bisa menggantikan peran sosialnya dengan memberikan iuran yang dikutip setiap bulan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Keuchik Gampong.

Untuk kegiatan ronda malam misalnya, Keuchik Gampong Peunayong membentuk lembaga KASABA, yaitu Keamanan Siaga Bencana. Lembaga ini berfungsi mengelola system keamanan sekaligus memastikan keamanan gampong dari gangguan keamanan dan ancaman bencana. Pengurus lembaga ini berjumlah 18 orang terdiri dari 3 orang pengawas, 1 orang bendahara, 10 orang petugas dan 4 orang pengutip iuran. Kesemua pengurus KASABA merupakan masyarakat Aceh beragama Islam.

Sementara itu, dalam rangka mengimbangi minimnya peran dan partisipasi sosial warga Peunayong, khususnya etnis Tionghoa dalam kegiatan sosial, mereka kemudian mengimbangiannya dengan melakukan kegiatan kemanusiaan. Beberapa aksi kemanusiaan yang mereka lakukan di antaranya adalah donor darah, penyaluran beras untuk keluarga miskin untuk tiap-tiap gampong di Kota Banda Aceh, bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor, serta aksi damai untuk membela etnis Rohingya yang tertindas di Myanmar.

Donor darah merupakan kegiatan tahunan. Kegiatan ini di koordinir oleh Hakka, organisasi yang memayungi salah satu suku Cina di Banda Aceh. Setiap tahun, rata-rata 93 kantong darah berhasil dikumpulkan dari puluhan warga keturunan Tionghoa usia remaja hingga dewasa. Hasil donor darah tersebut disumbangkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Banda Aceh.¹⁷

Selain donor darah, warga keturunan Tionghoa melalui perkumpulan Hakka setiap tahunnya juga memberikan bantuan beras kepada warga miskin di gampong-gampong yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh. Sumbangan beras

¹⁷ "Suku Hakka Sumbang Darah 93 Kantong:", *Harian Serambi Indonesia*, Edisi 14 Februari 2012

yang dibagikan Hakka berasal dari warga keturunan Tionghoa dari suku Hakka yang telah berhasil di perantauan.¹⁸

Bantuan untuk korban Banjir Bandang di Tangse adalah bentuk aksi kemanusiaan lainnya. Ketika Tangse ditimpa musibah Banjir Bandang pada tahun 2010, umat Budha di Banda Aceh secara spontan mengumpulkan bantuan. Pengalaman menjadi korban tsunami 2004 telah mendorong masyarakat etnis keturunan Tionghoa memaknai musibah Banjir Bandang Tangse, layaknya mereka dihempas gelombang Tsunami 2004 silam. Bantuan tersebut diantar langsung oleh Pengurus Vihara Sakyamuni Peunayong Banda Aceh.¹⁹

Umat Budha Kota Banda Aceh juga turut berpartisipasi dalam aksi damai turun ke jalan menuntut pemerintahan Myanmar yang mayoritas beragama Budha untuk menghentikan penindasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Aksi ini dilakukan bersama-sama dengan elemen masyarakat sipil lainnya di Banda Aceh.

Interaksi Keseharian Melalui Budaya

Budaya merupakan salah satu wahana alternatif berinteraksi masyarakat interkomunal umat beragama. Namun, kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya baik intrakomunal apalagi interkomunal masih sangat jarang digelar di Kota Banda Aceh, baik oleh pihak pemerintah kota, institusi pendidikan maupun kelompok yang tergabung dalam organisasi budaya dan seni.

Satu satunya kegiatan budaya yang digelar di Kota Banda Aceh dengan melibatkan masyarakat interkomunal adalah Festival Peunayong. Festival ini diadakan selama dua hari berturut turut pada 6 hingga 7 Mei 2011, yaitu dalam rangka Visit Banda Aceh 2011 sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 806 Kota Banda Aceh.

Keterlibatan masyarakat interkomunal dalam Festival Peunayong tidak hanya sebagai peserta festival, tapi juga sebagai panitia pelaksana festival di tingkat gampong dan kecamatan. Namun kegiatan seperti ini jarang terjadi, bahkan baru pertama kali diadakan di Kota Banda Aceh.²⁰

Dalam konteks menjaga kerukunan, keharmonisan dan perdamaian antar etnis dan umat beragama, kegiatan-kegiatan budaya yang bersifat multikultural seperti Festival Peunayong sangat membantu mengurangi ketegangan sosial sekaligus meningkatkan kesepahaman antar masyarakat yang berbeda latar belakang agama dan budaya.

Seperti dalam Festival Peunayong yang digelar pada tahun 2011, panitia menampilkan pameran budaya dari etnis keturunan Tionghoa, membuka lokasi

¹⁸ Wawancara dengan Kho Khie Siong, Ketua Perkumpulan Hakka Kota Banda Aceh pada 8 Agustus 2012 di depan Dealer Suzuki, Kampung Laksana Banda Aceh.

¹⁹ Mereka yang Hidup Damai di Negeri Syariat. Unduh di www.acehkita.com 10/03/2012

²⁰ Wawancara dengan Safruddin, Keuchik Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh pada 7 Agustus 2012 di Kantor Keuchik Peunayong.

jajanan khas etnis Tionghoa dan menampilkan atraksi Barongsai sebagai salah satu budaya andalan etnis Tionghoa.

Di stand pameran budaya etnis Tionghoa yang dibangun di lokasi Festival Peunayong, masyarakat juga bisa melihat secara langsung hasil karya seni, kerajinan tangan, foto-foto sejarah dan foto kegiatan etnis Tionghoa di Aceh dari masa ke masa, dokumen sejarah dan barang-barang khas etnis Tionghoa lainnya. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat Kota Banda Aceh tentang keberadaan dan budaya etnis Tionghoa serta agama yang mereka anut menjadi lebih mendalam dan meningkat.

Masyarakat sangat antusias datang menyaksikan langsung atraksi Barongsai di mana selama ini masyarakat Kota Banda Aceh hanya menyaksikan atraksi tersebut melalui media televisi atau membaca dari surat kabar.

Antusiasme masyarakat terhadap atraksi Barongsai yang ditampilkan di Festival Peunayong paling tidak menunjukkan dua hal; pertama, rasa ingin tahu masyarakat Kota Banda Aceh terhadap budaya dari etnis yang berbeda ternyata sangat tinggi. Kedua, masyarakat Kota Banda Aceh butuh budaya alternatif yang menghibur sebagai wahana hiburan yang selama ini hanya didominasi oleh budaya lokal dan budaya-budaya yang dikonstruksi media massa.

Selain atraksi Barongsai, Festival Peunayong juga menampilkan beberapa tarian khas Aceh seperti Tari Seudati dan Tari Ranup Lampuan. Peserta dari dua tarian khas Aceh tersebut tidak hanya berasal dari etnis Aceh yang beragama Islam, tapi juga melibatkan etnis Tionghoa yang beragama Kristen dan Budha.

Artinya, di tingkat *grass root* atau struktur masyarakat paling bawah, interaksi interkomunal sesungguhnya telah terjadi dengan baik. Proses saling memahami dan mencintai budaya lain secara diam-diam telah dimulai. Festival Peunayong merupakan satu bukti dimana masyarakat berbeda agama dan etnis di Kota Banda Aceh tidak kaku dalam memahami perbedaan. Mereka bisa saling bergandengan tangan dalam memainkan tarian Seudati dan Ranup Lampuan. Mereka juga bisa berjingkok dan melompat bersama dalam atraksi Barongsai.

Persoalannya dukungan dari pemerintah masih kurang dan seringkali persoalan budaya diseret ke wilayah politik. Kasus pelarangan atraksi Barongsai pada 13 Agustus 2012 dalam rangka memperingati 7 tahun perdamaian Aceh merupakan salah satu contoh dimana wilayah budaya diseret ke wilayah politik keagamaan.

Beberapa anomali dan aroma politik dengan jelas tercium ketika pada awalnya Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh memberi izin sekaligus mendukung kegiatan memperingati 7 tahun penandatanganan MoU Helsinki yang diadakan oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian Aceh (JMSP) dengan menampilkan atraksi Barongsai. Namun, ketika Walikota dan Wakil Walikota berada di luar Banda Aceh tiba-tiba izin tersebut dicabut dan diganti

dengan larangan. Alasannya, atraksi Barongsai bisa mengganggu ketenangan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.²¹

Keputusan pelarangan atraksi Barongsai dalam rangka memperingati 7 tahun MoU Helsinki menuai kritik masyarakat. Bahkan salah seorang anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh, salah satu partai lokal terbesar di Aceh mengkritik kebijakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh tersebut yang melarang atraksi Barongsai. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh mendukung aksi kampanye damai yang dilakukan masyarakat, termasuk dari etnis Tionghoa.²²

Larangan terhadap atraksi Barongsai di tempat terbuka tidak hanya terjadi pada tahun 2012. Sebelum 2011, pegelaran Barongsai di tempat terbuka tidak pernah mendapat izin dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Atraksi tersebut dinilai bisa mengganggu ketentraman dan kerukunan antar umat beragama.

Pasar Aceh dan Peunayong; Interaksi sambil Bertransaksi.

Pasar Peunayong dan Pasar Aceh merupakan dua jembatan penghubung masyarakat interkomunal di Kota Banda Aceh. Dua pasar tersebut terkenal karena keduanya secara ekonomi dikuasai oleh etnis Tionghoa beragama Budha dan Kristen.

Pasar Peunayong yang terletak di Gampong Peunayong hampir 70 persen dikuasai oleh etnis Tionghoa beragama Budha dan Kristen. Sementara Pasar Aceh kurang dari 50 persen dikuasai secara ekonomi oleh etnis Tionghoa beragama Budha dan Kristen.

Interaksi interkomunal di dua pasar tersebut terjadi sambil masyarakat bertransaksi. Dua kutub ekonomi saling bertemu dan membutuhkan satu sama lain, yaitu di satu sisi penguasaan atau ketersediaan ekonomi oleh etnis Tionghoa, di sisi lain tuntutan dan kebutuhan barang dan jasa oleh masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam.

Rata-rata etnis Tionghoa yang menetap di Pasar Peunayong dan Pasar Aceh bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa perbengkelan khususnya menjual spare part kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, usaha penginapan, dan jasa perbengkelan. Sementara jenis usaha lain seperti rumah makan, warung kopi, toko pakaian, barang pecah belah, toko swalayan, tidak dikuasai secara dominan oleh etnis Tionghoa. Dengan kata lain, penguasaan jenis perdagangan tersebut lebih berimbang. Bahkan warung kopi, rumah makan dan pakain orang dewasa lebih dominan dikuasai oleh masyarakat

²¹ Wawancara dengan Kho Khie Siong, Ketua Hakka Banda Aceh pada 8 Agustus 2012 di depan Dealer Suzuki Peunayong Banda Aceh.

²² "Fraksi PA Kritisi Larangan Sekda Terhadap Pelaksanaan Kampanye Perdamaian", Harian Serambi Indonesia, Edisi Senin 13 Agustus 2012. Baca juga "Pemko Banda Aceh Larang Pertunjukan Barongsai, diunduh di <http://www.acehkita.com/berita/pemko-banda-aceh-larang-barongsai/> 12/08/2012. Diakses 23 September 2012.

Aceh. Jenis usaha tersebut barangkali bisa dipahami karena terkait dengan budaya masyarakat Aceh.

Pasar adalah wilayah netral dimana semua orang dari berbagai latar belakang etnis dan agama bisa datang dan bertransaksi secara terbuka.

Interaksi tanpa Ruang Publik

Ruang terbuka dan ruang publik di Kota Banda Aceh jumlahnya masih sangat terbatas. Ruang terbuka seperti taman bermain anak atau *play ground*, taman bacaan, taman gampong, sarana olah raga tingkat dusun dan gampong jumlahnya hampir tidak ada (lihat Tabel). Beberapa taman terbuka seperti Taman Sari, Blang Padang dan Taman Tepi Krueng Aceh lokasinya agak jauh dari lokasi dimana masyarakat interkomunal menetap.

Sementara ruang publik, seperti, Museum Tsunami, Kapal PLTD Apung, Museum Rumah Aceh, Geunongan, Taman Peutro Phang, pengelolaannya masih jauh dari harapan publik. Kegiatan atau pegelaran kegiatan yang bernuansa budaya interkomunal sangat jarang bahkan hampir tidak pernah digelar satu kali dalam setahun di Kota Banda Aceh. Yang ada hanya kegiatan rutin, seperti memberi pelayanan kepada pengunjung termasuk yang datang dari berbagai daerah untuk melihat isi Museum.

Museum Tsunami dan Kapal Apung PLTD dalam master plan sebenarnya menyediakan ruang untuk pertunjukan seni dan budaya serta pemutaran film. Namun sarana tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana tertulis dalam master plan.²³

Sistem pengelola ruang publik seperti Museum Tsunami merupakan salah satu masalah utama. Pengelolaan museum yang berada di bawah struktur Pemerintahan Kota membuat museum menjadi sangat birokratis. Masyarakat yang ingin memanfaatkan museum untuk kegiatan pegelaran seni dan budaya harus mengurus izin berlapis mulai dari bawah hingga ke jenjang paling atas. Tidak jarang izin pemakaian museum tidak keluar menjelang kegiatan dilaksanakan.²⁴

Selain pengelolaan, anggaran juga menjadi alasan tidak berkembangnya museum. Anggaran yang dialokasikan untuk museum dan ruang public lainnya di Kota Banda Aceh sangat terbatas. Alokasi anggaran hanya diperuntukkan untuk biaya perawatan gedung, pembelian alat tulis kantor dan insentif pegawai. Sementara anggaran program, persentasenya sangat rendah. Akibatnya, ruang gerak pihak pengelola menjadi sangat terbatas. Keterbatasan anggaran terjadi karena di tingkat elit atau di pihak pengambil

²³ Wawancara dengan Fauzan Santa, Rektor Sekolah Menulis Dokarim sekaligus pegiat Komunitas Tikar Pandan, salah satu organisasi yang sangat aktif dan kritis terhadap persoalan kebudayaan di Banda Aceh. Wawancara di lakukan pada 10 Agustus 2012 di Kantor Tikar Pandan.

²⁴ Wawancara dengan Sarjev, Ketua Komunitas The Krak pada 11 Agustus 2012 di Kantor The Krak Ulee Kareng.

kebijakan tidak memahami dengan sungguh sungguh hakikat pentingnya museum bagi masyarakat Kota Banda Aceh.²⁵

Sumber daya pengelola adalah masalah yang lain. Para pihak yang mengelola museum dan ruang publik rata-rata tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang seni dan budaya. Ini terjadi karena system penempatan pegawai yang merujuk pada asas kepentingan, bukan kebutuhan. Akibatnya mereka yang mengelola museum tidak memahami fungsi museum dengan baik.²⁶

Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan museum sebagai sebuah ruang public terbuka juga sangat rendah. Beberapa lembaga masyarakat seperti Dewan Kebudayaan Aceh Kota Banda Aceh (DKA) yang bergerak dalam bidang kebudayaan tidak aktif. Selain persoalan anggaran, konflik internal DKA menjadi penyebab ketidak-aktifan lembaga tersebut.²⁷

Akibat dari semua itu, museum dan ruang publik yang ada di Kota Banda Aceh hanya dibuka untuk pengunjung yang ingin melihat stand foto-foto korban tsunami. Padahal dalam konteks membangun interaksi interkomunal, ketersediaan sekaligus pemanfaatan ruang terbuka dan ruang publik seperti taman bermain, taman kota, tempat rekreasi, sarana olah raga, tempat pertemuan sangat diperlukan.

Pola tempat tinggal dan jenis pekerjaan membuat waktu masyarakat untuk bertemu sangat sedikit. Karena itu, keberadaan *play ground*, taman bacaan, taman gampong, sarana olah raga sangat membantu proses interaksi interkomunal di tingkat paling bawah.

Selama ini interaksi interkomunal di ruang terbuka dan ruang public sangat minim. Interaksi lebih banyak terjadi di ruang tertutup dan dalam konteks ekonomi.

Interaksi interkomunal umat beragama di Kota Banda Aceh lebih banyak terjadi dalam momen-momen tertentu seperti pada saat pesta perkawinan salah satu tetangga atau warga satu dusun tempat tinggal, ketika salah satu dari warga meninggal dunia atau sakit, pada saat hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri umat Islam atau, Natal bagi umat Kristen.

Ashutosh Varshney menyebutkan bahwa dalam sebuah masyarakat yang heterogen dari segi penganut agama, intensitas interaksi keseharian merupakan salah satu variable penting bagi terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai. Namun, interaksi keseharian tidak cukup membantu mencegah munculnya potensi ancaman yang datang atau bersumber dari luar.

²⁵ Wawancara dengan Reza Fahlevi, Kepala Dinas Parawisata Aceh Kota Banda Aceh pada 13 Agustus 2012 di Kantor Dinas Parawisata Kota Banda Aceh.

²⁶ Wawancara dengan Nab Bahani AS, Budayawan Kota Banda Aceh pada 11 Agustus 2012 di Warkop Cut Den Beurawe Banda Aceh.

²⁷ Wawancara dengan Fauzan Santa, Rektor Sekolah Menulis Dokarim sekaligus pegiat Komunitas Tikar Pandan, salah satu organisasi yang sangat aktif dan kritis terhadap persoalan kebudayaan di Banda Aceh. Wawancara dilakukan pada 10 Agustus 2012 di Kantor Tikar Pandan

Dengan kata lain, Ashutosh Varshney mengatakan bahwa interaksi keseharain masyarakat interkomunal bukan lah satu-satunya variabel yang menentukan terjaganya perdamaian atau keharmonisan di suatu daerah yang komposisi penduduknya heterogen. Masih ada beberapa variable lain yang juga turut menentukan, bahkan perannya jauh lebih besar dibandingkan variable interaksi keseharian.

Namun demikian, interkasi keseharian juga perlu dilihat secara mendalam, terutama dari segi pola atau bentuk interaksi. Bagian ini adalah hasil penelitian yang menunjukkan beberapa pola interaksi keseharain masyarakat interkomunal di Kota Banda Aceh.

Pola Interaksi Asosiasional

Interaksi asosiasional yang menjadi kajian penelitian ini adalah interaksi yang terjadi pada tingkat asosiasi atau dalam sebuah organisasi yang tidak berbasiskan agama atau etnis tertentu seperti Islam atau etnis Aceh.

Dalam kajian ini interaksi semacam itu disebut interaksi interkomunal, karena ia menghubungkan komunitas-komunitas antar agama dan etnis sehingga semua pihak dengan latar belakang agama dan etnis yang berbeda bisa bergabung menjadi pengurus kedalam organisasi tersebut.

Dari kajian lapangan di Kota Banda Aceh, organisasi atau asosiasi interkomunal sangat banyak jumlahnya. Misalnya jika melihat database organisasi masyarakat, profesi, sosial dan kepemudaan yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpollinmas Kota banda Aceh tahun 2000, jumlah organisasi yang bisa dikategorikan interkomunal di Kota Banda Aceh lebih dari 200 organisasi. Jumlah tersebut sangat banyak untuk ukuran Kota Banda Aceh yang jumlah penduduknya hanya 2998 jiwa.²⁸

Karena itu, kajian ini hanya fokus pada beberapa organisasi saja yang dinilai secara kelembagaan dan kepengurusan aktif sekaligus bisa menggambarkan kiprah pengurus berdasarkan profesinya. Beberapa organisasi yang dilihat adalah dalam bidang pemerintahan, pendidikan dan profesi.

Interaksi dalam Struktur Organisasi Pemerintahan

Interaksi interkomunal atau interaksi yang melibatkan umat beragama hanya terjadi di tingkat organisasi pemerintahan gampong. Sementara di tingkat kecamatan dan pemerintahan kota, tidak terjadi interaksi interkomunal. Indikator yang dipakai untuk melihat ada atau tidak adanya interaksi interkomunal dalam sebuah organisasi adalah dengan memastikan kepengurusan di dalam struktur organisasi.

Berdasarkan penelurusan dan kajian lapangan, ditemukan bahwa dari 9 kecamatan dan 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh, hanya Gampong

²⁸ Lihat Buku Direktori Ormas, OKP, dan Organisasi Profesi yang diterbitkan Kesbangpolinmas Provinsi Aceh, 2000.

Peunayong yang melibatkan warga dari umat Budha kedalam pengurus organisasi gampong.

Sementara di Gampong Laksana, interaksi interkomunal terjadi antar etnis, yaitu etnis Tionghoa, Ambon dan etnis Jawa. Namun, semua etnis tersebut beragama Islam.

Pada tingkat kecamatan dan pemerintahan kota malah tidak ada satu pun pengurus organisasinya yang berasal dari non muslim. Artinya, seratus persen pengurus organisasi di tingkat kecamatan dan kota beragama Islam sehingga secara formal bisa dikatakan bahwa tidak terbangun jaringan interaksi interkomunal di tingkat kecamatan dan kota di Banda Aceh.

Di dalam struktur pemerintahan Gampong Peunayong, satu dari empat kepala dusun merupakan penganut agama Budha, tepatnya di Dusun Merpati. Selain kepala dusun, salah seorang *Tuha Peut* dari empat orang yang duduk di dalam struktur *Tuha Peut* Gampong Peunayong juga beragama Budha.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan penganut Budha sebagai Kepala Dusun dan *Tuha Peut* Gampong tidak sekedar formalitas dalam rangka mengisi struktur kepengurusan gampong berdasarkan komposisi penduduk. Sejumlah peran sosial dan kemanusiaan dilakukan dengan baik oleh mereka yang beragama Budha.

Misalnya Aki, salah seorang anggota *Tuha Peut* Gampong Peunayong dari keturunan Tionghoa beragama Budha, dia sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Keterlibatannya dalam kegiatan sosial bahkan tidak hanya di tingkat gampong, tapi juga di tingkat kecamatan dan kota.

Peran sosial yang dimainkan Aki di tingkat kecamatan dan kota bisa di lihat sebagai upaya untuk mengisi kekosongan umat Budha dalam struktur kepengurusan organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan dan kota. Yaitu semacam peran jangkar atau penghubung antara warga keturunan Tionghoa dengan masyarakat Aceh di tingkat Kecamatan Kuta Alam dan Kota Banda Aceh.²⁹

Akibatnya, tidak ada *Keuchik* di Kecamatan Kuta Alam yang tidak mengenal Aki. Begitu juga di Pemerintahan Kota Banda Aceh, Walikota, Wakil Walikota, Sekda serta Kepala Dinas rata-rata mengenal nama Aki.³⁰

Selain menjadi anggota *Tuha Peut* Gampong, Aki juga aktif menjadi pengurus Hakka, yaitu organisasi tempat berkumpulnya suku Kheh, salah satu suku etnis keturunan Tionghoa di Banda Aceh. Karena itu, selain berperan aktif di dalam masyarakat Gampong Peunayong, Aki juga terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan di bawah payung organisasi Hakka.

²⁹ Wawancara dengan Aki, Ketua Hakka Kota Banda Aceh, pada malam 8 Agustus 2012 di Depan Dealer Suzuki, Peunayong Banda Aceh.

³⁰ Wawancara dengan Halik Saing, M. Si, Keuchik Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, pada 13 Agustus 2012 di Kantor Keuchik Kota Baru.

Namun, keberadaan Aki selaku *Tuha Peut* Gampong dan Steph Nawi sebagai Kepala Dusun jumlahnya tidak berbanding lurus dengan jumlah gampong dan jumlah umat non muslim yang ada di Kota Banda Aceh. Seharusnya, di beberapa daerah padat penduduk non muslim, peluang non muslim menjadi kepala dusun atau bahkan keuchik sekalipun harus tetap ada, bahkan bila perlu mereka di dorong untuk maju mengisi posisi-posisi kunci di semua tingkat tersebut, sehingga interaksi interkomunal berjalan dengan baik.

Interaksi dalam Organisasi Sekolah

Sekolah merupakan salah satu organisasi yang penting dilihat dalam konteks interaksi interkomunal antar umat beragama di Kota Banda Aceh. Selain perannya yang strategis dalam membangun karakter manusia, sekolah sebagai organisasi pendidikan juga merupakan miniatur dari potret masyarakat itu sendiri. Artinya, kualitas pendidikan di tiap-tiap sekolah akan berbanding lurus dengan kualitas masyarakat itu sendiri. Jika kualitas sekolahnya baik, maka kualitas masyarakatnya pun akan baik.

Karena itu, konstruksi ideal masyarakat mulai dibangun dari sekolah, termasuk bagaimana para siswa belajar berinteraksi dengan kelompok yang berbeda latar belakang agama, etnis dan budaya. Pengalaman berinteraksi selama di sekolah akan sangat membantu para siswa dalam kehidupan nyata yang dinamis dan penuh tantangan.

Namun, sayangnya kesempatan untuk mengalami proses interaksi interkomunal di sekolah sangat terbatas karena komposisi siswa berdasarkan perbedaan latar belakang agama sangat sedikit di sekolah dalam lingkup wilayah Pemerintahan Kota Banda Aceh.

Dari empat sekolah yang berhasil dikumpulkan datanya, yaitu SMA 1, SMA 2, SMA Methodits dan SMA Budhi Dharma, komposisi siswa berdasarkan latar belakang agama sangat sedikit jumlahnya, atau bisa dikatakan tidak berimbang.

Di SMA 1 misalnya, hanya 4 orang siswa non muslim dari 484 jumlah siswa secara keseluruhan. Demikian juga dengan SMA 2, siswa non muslim hanya 4 orang dari total 680 siswa. Sementara itu, di sekolah SMA Methodits terjadi sebaliknya, jumlah siswa muslim hanya 2 orang dari 130 jumlah siswa secara keseluruhan. Begitu juga di SMA Budhi Dharma, siswa muslim hanya 2 orang dari 75 orang total siswa.

Dengan komposisi siswa seperti itu, maka sulit bagi siswa di Kota Banda Aceh belajar bagaimana berinteraksi antar teman beda agama. Apalagi, pihak sekolah juga tidak pernah menyediakan kegiatan alternatif seperti festival kebudayaan, kunjungan ke rumah ibadah antar umat beragama atau mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama atau dialog multikultur.

Kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya sangat membantu siswa memahami perbedaan dan keberagaman di lingkungannya, meskipun komposisi siswa di sekolahnya bersifat homogen.

Dari empat sekolah yang dikumpulkan datanya, tidak ada satupun sekolah yang menjadikan kegiatan bernuansa lintas agama sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Kebanyakan kegiatan ekstrakurikuler di empat sekolah itu justru diisi dengan kegiatan akademik seperti matrikulasi pelajaran yang dilombakan di Olimpiade atau pelajaran yang akan dihadapi di Ujian Nasional (UN). Selain itu, penguatan pengetahuan agama juga dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Akibatnya, ruang interaksi interkomunal siswa antara umat beragama menjadi sangat terbatas, karena semua kegiatan diisi dengan kegiatan penunjang akademik yang diadakan di sekolah. Seharusnya, waktu senggang di sore hari bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk berinteraksi dengan kawan-kawan satu dusun atau satu kampung yang berbeda latar belakang agama. Namun kesempatan tersebut hilang akibat terlalu padatnya kegiatan di sekolah.

Interaksi interkomunal antar umat beragama sedikit lebih baik pada level guru. Indikasi ini bisa dilihat dari komposisi guru, terutama di SMA Methodist dan SMA Budhi Dharma. Jumlah guru di SMA Methodist semuanya berjumlah 26 orang, dengan rincian 19 orang beragama Islam dan 7 diantaranya non muslim. Sedangkan di SMA Budhi Dharma, guru secara keseluruhan berjumlah 17 orang, dengan rincian 14 orang muslim dan 3 orang beragama non muslim.

Komposisi guru seperti dirincikan di atas bisa menjelaskan bahwa SMA di bawah yayasan yang dikelola nonmuslim seperti Methodist dan Budhi Dharma jauh lebih terbuka terhadap guru dari agama berbeda dibandingkan dengan SMA lain yang ada di Kota Banda Aceh. SMA 1 dan SMA 2 misalnya, semua guru beragama Islam.

Sikap terbuka sekolah non muslim menerima guru yang berasal dari kalangan muslim hingga saat ini belum pernah menuai masalah. Baik masalah tersebut terjadi antara guru dengan guru, guru dengan siswa atau sesama siswa. Keharmonisan antar agama di sekolah non muslim tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ancaman jika di tiap-tiap sekolah rekrutmen guru dan siswa dilakukan secara terbuka, tanpa memandang latar belakang agama. Malah keberagaman siswa dan guru tersebut dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Interaksi dalam Organisasi Profesi dan Politik

Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan masih banyak yang lainnya merupakan organisasi-organisasi pilar dalam konteks membangun jaringan interaksi interkomunal antar umat beragama.

Keberadaan organisasi profesi tersebut sangat penting, tidak saja dalam konteks pengembangan profesi dan karir, tapi juga dalam rangka memperkuat basis sosial keberagaman masyarakat, termasuk dalam hal agama.

Kota Banda Aceh termasuk daerah yang memiliki cukup banyak organisasi profesi. Statusnya sebagai ibu kota provinsi merupakan salah satu faktor keberadaan organisasi tersebut di Banda Aceh. Namun, banyaknya jumlah organisasi profesi tidak dibarengi dengan komposisi ideal pengurus dari segi agama.

Beberapa organisasi profesi yang berhasil dikumpulkan datanya dari sisi komposisi pengurus berdasarkan agama adalah IDI, HIPMI, PWI dan PGRI. Dan dari semua organisasi tersebut ditemukan informasi bahwa, tidak satupun pengurusnya berasal dari non muslim. Artinya, semua pengurus organisasi profesi tersebut beragama Islam.

Demikian juga dengan organisasi yang membawa misi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dan Satuan Siaga Bencana (TAGANA), semua pengurusnya beragama Islam.

Organisasi kepemudaan seperti KNPI dan organisasi tempat berhimpunnya seniman seperti Dewan Kesenian Aceh (DKA) pengurusnya juga seragam dari kalangan muslim.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa interaksi asosiasional inter-komunal antar umat beragama di Kota Banda Aceh sangat rendah.

Kesimpulan

Pola interaksi interkomunal umat beragama di Kota Banda Aceh lebih sering terjadi dalam bentuk keseharian dibanding asosiasional. Bentuk interaksi keseharian sebagaimana telah diuraikan dalam bab pembahasan hasil penelitian adalah interaksi yang terjadi dalam bentuk sehari-hari di tingkat *gampong* atau dusun seperti saling berkunjung pada hari-hari besar agama, saling berkunjung ketika salah satu keluarga tetangga berbeda agama dan etnis ditimpa musibah, sakit atau meninggal dunia, dan menghadiri pesta perkawinan. Kegiatan sehari-hari seperti itu relatif sering terjadi pada tingkat *gampong* bahkan dusun sehingga dengan pola interaksi seperti itu hubungan warga interkomunal baik berbeda keyakinan maupun berbeda etnis berlangsung dengan sangat baik.

Namun, interaksi yang bersifat asosional atau berbasis organisasi, baik organisasi profesi, sosial dan politik, persentasenya sangat sedikit bahkan hampir tidak ditemukan di Kota Banda Aceh.

Dari data yang berhasil dikumpulkan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada organisasi profesi dan kemanusiaan di Kota Banda Aceh yang pengurusnya berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Dengan kata lain, rata-rata pengurus asosiasi atau organisasi profesi seperti Ikatan Dokter

Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) semuanya berasal dari penganut agama Islam.

Demikian juga dengan organisasi sosial seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) rata-rata pengurusnya beragama Islam dan beretnis Aceh.

Ketimpangan pola interaksi seperti ini menyebabkan hubungan di tingkat kelas menengah dan elit tidak berjalan dengan baik. Akibatnya basis pendukung atau suprastruktur perdamaian dan keharmonisan beragama di Kota Banda Aceh menjadi rapuh.

Sikap curiga atau tidak percaya terutama berkaitan dengan isu-isu keagamaan sangat mudah muncul di tingkat kelas menengah dan elit. Mobilisasi massa dari luar *gampong* atau dusun dalam beberapa kasus seperti amuk massa dan pengrusakan ruko di Peunanyong yang diduga digunakan sebagai rumah ibadah merupakan contoh kasus dimana keharmonisan warga tidak cukup menjadi penghalang bagi masuknya kelompok luar.

Ikatan kewargaan sehari-hari yang telah terjalin dengan baik di tingkat *gampong* dan dusun memang memadai untuk memelihara kedamaian di tingkat *gampong* dan dusun, namun umumnya gagal untuk mencegah terjadinya kekerasan secara lebih luas. Karena itu, ikatan kewargaan dalam bentuk asosiasi-asosiasi yang terintegrasi dengan penganut agama berbeda menjadi lebih bernilai dari pada ikatan keseharian.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ashutosh Varshney yang menyebutkan bahwa interaksi keseharian masyarakat interkomunal bukan lah satu-satunya variabel yang menentukan terjaganya perdamaian atau keharmonisan di suatu daerah yang komposisi penduduknya heterogen. Masih ada beberapa variabel lain yang juga turut menentukan, bahkan perannya jauh lebih besar dibandingkan variabel interaksi keseharian.

Penelitian ini dari awal telah dipertegas tidak mencakup asosiasi-asosiasi *intrakomunal* atau *intraetnis*. Hal ini bukan berarti asosiasi-asosiasi semacam itu sama sekali tidak berguna dalam melihat perdamaian di suatu wilayah, melainkan bahwa mereka tidak terbukti berguna bagi kepentingan kedamaian etnis atau komunal.

Ringkasnya, untuk kedamaian komunal, ikatan kewargaan interkomunal lebih baik daripada tidak ada ikatan atau hanya ada ikatan *intrakomunal*; dan dalam kategori yang pertama, sejalan dengan meningkatnya ukuran lokalitas, ikatan asosiasional lebih baik dari pada ikatan keseharian. Faktor penentu utama kedamaian adalah kehidupan kewargaan interkomunal, bukan kehidupan kewargaan itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu-Nimer, Mohammed. *Kekerasan dan Bina Damai Dalam Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: Alvabet, 2010.
- Beuken, Wim dan Karl-Josef Kuschel, et al. *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, 2000.
- Hassan, Riaz. *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Klinken, Gerry van, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Mudzhar, Atho, Dr. H. M. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nusa Bakti, Ikrar. (Peny). *Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008.
- Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali-Fauzi, *Merawat Kebersamaan Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2011 .
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rozi, Syafuan dkk. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Romdon, Drs, MA, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama Suatu Pengantar Awal*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Troll, Cristian W. *Muslim Bertanya Kristen Menjawab*, Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2011.
- Varshney, Ashutosh. *Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil Pengalaman India*, Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2009.
- Vredenburg, Jacob . *Pengantar Metodologi untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.

Wink, Walter. *Damai adalah Satu-Satunya Jalan: Kumpulan Tulisan tentang Nir-Kekerasan dari Fellowship of Reconciliation*, Jakarta: Gunung Mulia, 2009.